

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008.
- Akhmad Aulawi, *Penerapan Sistem merit dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur Politik dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal RechtsVindingOnline.
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974.
- A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, 2006.
- Burhannudin A. Tayibnapi, 1995, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Jeddawi, Murtir, *Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS*, Ctk Pertama, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008.
- Moekijat, *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Pionir, Bandung, 1989.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, Bina Aksara, 1982.

Mudjiono, *Sistem Kepegawaian Daerah*, 2000.

Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Remaja Karya, Bandung, 1993.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.

Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 2007.

Soekarno & Fathorrajid, *Pelayanan publik dari dominasi ke partisipasi*, Forum kajian Ambtenaar Probinsi JawaTimur & Airlangga University Pers, Surabaya, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sri Hartini, S.H., M.H, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

T. Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1992.

Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1993.

B. Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-IV Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

C. Sumber Lain

Abi Ma'ruf Radjab, *Mutasi : Bentuk Sanksi Di Bidang Kepegawaian*, Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran, VeJ Volume 6 No. 50.

Artikel Edukasi Keuangan, Edisi 23, 2014.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Humas MENPANRB, <https://mempan.go.id/site/berita-terkini/kemendagri-diminta-tegas-sikapi-gelombang-mutasi>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 20.58 wib

Jurnal Jawa Tengah tentang Pedoman Pemindahan (Mutasi) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Muhajid & Edwar, *Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Sinar Manajemen, Vol. 5 No. 2, 2018.

Rendra Oxiora, *KASN Dituntut Tingkatan Pengawasan*, dalam <https://www.anatarakalbar.com> diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 12.20 wib